

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bolaang Mongondow adalah sebuah suku bangsa di Indonesia. Dimana suku Mongondow adalah merupakan penduduk Kerajaan Bolaang Mongondow yang pada tahun 1954 secara resmi bergabung dengan NKRI dan menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow. Suku ini kebanyakan bermukim di Sulawesi Utara.

Di masa-masa awal Bolaang Mongondow menjadi daerah otonom, dalam satu permasalahan mengenai masuknya suatu organisasi atau perkumpulan yang menamakan dirinya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berpusat di kota Padang Sumatera Barat dan apa yang dinamakan Permesta (Perjuangan Semesta) yang berpusat di Manado. Pada tahun 1958-1961 sempat membuat situasi krusial di Bolaang Mongondow pada saat itu.

Pemilihan Umum tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Di daerah muncul Dewan-dewan seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Medan, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Manado. Gerakan daerah itu kemudian berkembang menjadi gerakan terbuka yang terkenal dengan PRRI/Permesta. PRRI diproklamasikan oleh Achmad Husein tanggal 15 Februari 1958 sedangkan Permesta diproklamasikan oleh Ventje Sumual tanggal 2 Maret

1957. Para perwira yang dianggap melakukan pemberontakan dipecat dari TNI sehingga TNI mengalami reorganisasi.

PRRI/Permesta kemudian mendirikan pemerintahan tandingan dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, pendirian pemerintah tandingan ini menimbulkan konflik bersenjata antara TNI dengan PRRI/Permesta dari tahun 1958 sampai tahun 1961. Gerakan PRRI/Permesta diketahui mendapat bantuan dari pihak Asing, terbukti dengan tertembaknya pilot kebangsaan Amerika Serikat bernama Allan Pope. Kejadian tersebut merubah sikap pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat. Masyumi dan PSI dua partai yang juga membantu gerakan PRRI/Permesta dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada Agustus 1960.

Banyak yang menilai bahwa gerakan PRRI/Permesta bukan merupakan suatu pemberontakan, melainkan Konflik yang terjadi pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Dan sebelumnya bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom

oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang.

Namun apa yang menjadi pertentangan ini, dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan kemudian dipukul habis dengan pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia.

Akan tetapi beberapa pendapat para ahli baik itu berbentuk buku, tesis, jurnal dan penelitian bahwa permesta bukanlah suatu gerakan pemberontakan melainkan suatu gerakan koreksi terhadap pemerintahan pusat di Jakarta. Ini merupakan suatu dukungan dimana seakan permesta tidak pernah berbuat kesalahan melainkan memiliki substansi atau nilai yang positif dalam perjuangannya. Pendeklarasian di Makassar pada 2 Maret 1957–kemudian menyusul pendeklarasian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh Letkol Achmad Husein di Padang pada 15 Februari 1958–bukanlah pemberontakan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Mungkin ini sebuah fakta lain. Dalam sejarah versi resmi pemerintah, Permesta dan PRRI diklasifikasikan sebagai sejarah hitam, gerakan pemberontakan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. “Dari hasil penelitian saya, baik Permesta maupun PRRI itu bukan pemberontakan, sekali lagi, bukan pemberontakan,” tegas Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran, dalam bukunya *Memoar Ventje Sumual*, (2000: 115.)

Kesimpulan Nina berdasarkan penelitian yang mengacu pada dokumen Permesta yang tegas menyatakan bahwa Permesta tidak berniat mendirikan negara di luar Republik Indonesia. Selain ketegasan itu, Permesta pun mengangkat M Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pengelola negara.

Kemudian Pengamat militer Salim Said pun juga menyimpulkan bahwa gerakan Permesta bukanlah gerakan separatis. Menurut dia, Permesta adalah gerakan yang didesain untuk mencari alternatif pemerintahan yang lebih baik. Kebutuhan akan pemerintahan yang lebih baik dipicu oleh pengabaian pemerintahan pusat yang berciri sentralistik atas kepentingan daerah. Selain memicu deklarasi Permesta, pengabaian pusat atas daerah pun memicu pendeklarasian PRRI.

Pelaku sejarah yang terlibat dalam Permesta, Alwin Nurdin, menegaskan bahwa Permesta dan PRRI sesungguhnya adalah bagian dari perjuangan bangsa. “Ketidakpuasan atas pengelolaan Republik itulah yang melahirkan Permesta dan itu bukan semata pergolakan daerah,” imbuh Alwin. Namun, dalam menyikapi kehadiran Permesta, institusi militer mengambil keputusan untuk menumpas gerakan Permesta secara militer.

Adapun anggota DPR Theo Sambuaga menilai bahwa keputusan Ventje Sumual mendeklarasikan Permesta semata-mata digerakkan kepedulian demi membangun bangsa. “Om Ventje lakukan itu semua demi bangsa dan negara, ia bukan seorang avonturir,” tegas Theo.

Kesimpulan Theo dibuktikan dengan keputusan Ventje Sumual melepas aktivitas di dunia militer selepas penumpasan Permesta oleh pihak Republik. Pasca Permesta, Ventje Sumual sepenuhnya beraktivitas di bidang ekonomi.

Terlepas dari situasi tersebut, anggota DPD AM Fatwa menambahkan pemerintahan di era Reformasi saat ini malah menerapkan gagasan-gagasan yang mengilhami pendeklarasian Permesta. Fatwa menyebut bahwa otonomi daerah, perimbangan keuangan antara daerah dan pusat serta institusi DPD adalah gagasan-gagasan Permesta.

Salim Said dalam bukunya juga menilai bahwa Permesta dan PRRI merupakan bagian dari perjalanan bangsa. Ia pun merefleksikan peristiwa-peristiwa lainnya yang turut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, semisal Gerakan 30 September. “Ternyata, kita adalah bangsa yang membutuhkan pertumpahan darah agar bisa naik kelas,” simpulnya getir. Salim yang dikenal sebagai pengamat militer ini berbagi kisah bahwa kesulitan utama pembelajaran sejarah bangsa adalah kurangnya ketersediaan data yang ada di dalam negeri. Sewaktu melakukan riset di Den Haag, Belanda, dalam tempo yang singkat Salim dapat mengumpulkan dokumen data seberat 20 kilogram sebagai bahan penulisan disertasi. Hal berbeda ketika meriset data di Arsip Nasional di Indonesia. “Selama berbulan-bulan saya tidak mendapatkan apa-apa, bahkan minuet rapat pun sulit sekali diperoleh,” terang Salim.

Bolaang Mongondow tidak lepas dari peranan sejarah sehingganya lewat eksplanasi di atas penulis mencoba melihat bagaimana wajah Bolaang

Mongondow pada zaman permesta dengan mengambil beberapa sumber yang bisah menjadi proposal dan bermanfaat untuk menghindari kerancuan, pemutihan ataupun pembabakan sejarah dengan mengangkat judul : **“Permesta di Bolaang Mongondow 1958-1961”** dengan melakukan fokus penelitian di Kecamatan Bilalang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang masuknya permesta di Bolaang Mongondow?
2. faktor-faktor apa saja yang melahirkan persepsi masyarakat tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang masuknya permesta di Bolaang Mongondow.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa yang melahirkan persepsi masyarakat tersebut.
3. Sebagai data awal agar supaya tidak terjadi kerancuan dalam sejarah permesta di Bolaang Mongondow.